

MENSOS AJAK PUBLIK FIGUR KUNJUNGI SENTRA KREASI ATENSI
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) bersama artis Raffi Ahmad (kedua kiri) dan koki Renatta Moeloek (kiri) mengecek produk saat pelatihan memasak bagi penerima manfaat di Sentra Kreasi ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/6). Mensos mengajak publik figur untuk memberikan pelatihan, motivasi dan ikut mempromosikan produk-produk karya penerima manfaat.



Belanja Pemerintah Rp607,7 Triliun Jadi Peluang Serap Produk Lokal

Agus Gumiwang Kartasmita mengemukakan, potensi belanja pemerintah maupun badan usaha nasional sangat besar untuk dapat membelanjakan produk dalam negeri. "Manfaatnya antara lain dapat menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan utilisasi industri nasional," tutur Agus.

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian bertekad untuk semakin menggaungkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Langkah strategis ini dinilai dapat membangkitkan kembali gairah usaha bagi para pelaku industri di tanah air yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita saat berdialog dengan para peserta Bimbingan Teknis Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Solo, akhir pekan kemarin, seperti dikutip dari laman Kemenperin, Minggu (20/6). Agus mengemukakan, potensi belanja pemerintah maupun badan usaha nasional sangat besar untuk dapat membelanjakan produk dalam negeri.

"Manfaatnya antara lain dapat menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan utilisasi industri nasional," tuturnya. Adapun potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2021 mencapai Rp607,7 triliun. Jumlah tersebut semestinya bisa dioptimalkan sebagai peluang terhadap penyerapan produk dalam negeri. "Dapat dibayangkan jika separuhnya saja mampu diserap oleh industri dalam negeri, maka industri dalam negeri dipastikan dapat berkembang pesat," ungkap Agus.

Apalagi, Presiden Joko Widodo kerap menekankan agar anggaran pemerintah dapat diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri. Dukungan ini diperkuat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN, yang dikuatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga. "Saya sendiri sebagai Menteri Perindustrian ditunjuk Bapak Presiden sebagai Ketua Harian," ujarnya.

Tim Nasional P3DN memiliki tugas-tugas di antaranya memantau penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim P3DN, melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN, dan mengoordinasikan penyelesaian masalah yang timbul terkait penghitungan nilai TKDN. "Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamankan pemberdayaan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yang perlu saya garis bawahi dalam peraturan ini di antaranya adalah Pasal 86 yang mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, termasuk satuan kerja perangkat daerah," paparnya.

Badan usaha (BUMN, BUMD dan badan usaha swasta) juga wajib menggunakan produk dalam negeri jika pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. "Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi semua entitas yang disebutkan, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri yang ditunjukkan dengan nilai TKDN," ujar Agus.

Lebih lanjut dalam rangka menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, pemerintah telah menetapkan target nilai TKDN rata-rata mencapai sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% di tahun 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25% ditargetkan sebanyak 6.097 produk di tahun 2020 dan meningkat menjadi sebesar 8.400 produk pada tahun 2024. • dro

Bupati Bekasi Kukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bekasi

CIKARANG PUSAT (IM) - Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (17/6/21). Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Syafei, dan Kepala Dinas terkait.

Bupati Bekasi, Eka menyampaikan bahwa dirinya akan mengoptimalkan TP2DD karena sesuai dengan perkembangan saat ini yang menuntut untuk bisa melakukan banyak hal dengan digital. Tentu saja kita akan optimalkan dengan dibentuknya Tim Percepatan," jelasnya. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah bekerja sama dengan Bank BJB untuk melaksanakan transaksi pembayaran pajak secara digital.

Hal tersebut diharapkan agar pendapatan daerah dapat terus meningkat. "Kita memang sudah bekerja sama dengan Bank BJB untuk bagaimana transaksi pembayaran pajak dengan digital. Harapannya dapat meningkatkan lagi pendapatan daerahnya," ucap Eka.

Sementara itu, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Syafei dalam sambutannya menyampaikan bahwa terbentuknya TP2DD merupakan langkah awal untuk meningkatkan digitalisasi di Kabupaten Bekasi. Bukan hanya digitalisasi dalam hal pembayaran saja tetapi seluruh proses seperti produksi atau marketing diharapkan juga dapat dilakukan secara digital.

"Ini adalah langkah awal kita untuk meningkatkan digitalisasi di Kabupaten Bekasi. Diharapkan tidak hanya digitalisasi pembayaran saja, tetapi produksi, marketing, dan yang lainnya juga bisa dilakukan secara digital," pungkasnya. Dirinya menyampaikan terdapat beberapa aspek prioritas untuk memperluas digitalisasi, yaitu perbaikan informasi data, inovasi teknologi, infrastruktur, serta koordinasi dengan para pemangku jabatan. "Untuk memperluas digitalisasi terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi prioritas, yaitu perbaikan informasi data, inovasi teknologi, infrastruktur, serta koordinasi para pemangku jabatan," tukasnya.

Sasa dan Chatime Hadirkan Menu Spesial bagi Penggemar Minuman Kekinian



JAKARTA (IM) - PT Sasa Inti sebagai perusahaan bumbu dan makanan terkemuka di Indonesia bersama Chatime Indonesia, merek brewed tea populer, meluncurkan inisiatif #KolaborasiHakiki yaitu sebuah gebrakan baru lintas kategori untuk menciptakan pengalaman unik bagi penggemar minuman kekinian di Indonesia.

Sasa dan Chatime menghadirkan cita rasa Indonesia pada minuman unik Chococonut with Sasa Santan, dan Flamin' Hot Milk Tea with Sasa Boni Tabur yang tersedia hingga 31 Juli 2021 di seluruh gerai Chatime di Indonesia. Direktur Marketing PT Sasa Inti, Albert Dinata mengatakan, pihak terus berupaya mendukung dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia khususnya generasi muda yang selalu antusias untuk mencoba beragam hal baru.



BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor



PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

SU 01019
TELEPON KE LUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

Nepion Hemat Ke Luar Negeri
Suara Jernih ngobrol pun nyaman

Cuma Rp 6 an-/detik*

Tekan Kode Akses 01019
TELKOMSEL dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

https://www.facebook.com/GaharuTelecom https://www.twitter.com/GaharuTelecom

* Khusus untuk negara China, USA, Canada, Hong Kong, Singapore: tarif Rp 6 an-/detik dengan menggunakan GSM Telkomsel
* Tarif belum termasuk PPN & pembatasan per 6 detik

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI
Customer Service : 021-634 5009
Mobile : 0811 17 50 291-95
SMS : 0811 17 50 369
E-mail : support@gaharu.co.id

Pabrik Baterai Mobil Listrik Dibangun Bulan Depan

JAKARTA (IM) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG asal Korea mulai dibangun pada Juli 2021. "LG ini sudah mulai groundbreaking bulan Juli, paling lambat Agustus awal kita sudah kita bangun, ini bukan cerita dongeng, ini sudah kita lakukan," ungkap Bahlil Lahadalia dalam Rakornas dengan HIPMI secara virtual, Sabtu (19/6). Ia mengatakan, pabrik produksi baterai listrik yang disebut-sebut akan menjadi yang pertama di Asia dan terbesar pasca reformasi. "Kita sudah membangun kerja sama dengan LG sebesar US\$9,8 miliar atau Rp142 triliun. Ini investasi terbesar pasca reformasi baru kali ini," katanya.

Optimis jadi yang terbesar di dunia, karena Bahlil mengungkapkan bahan-bahan untuk pembuatan baterai mobil listrik 50% berada di Indonesia, terutama nikel. Dia tegaskan pemerintah telah melarang ekspor Nikel agar Indonesia bisa menjadi produsen baterai terbesar di dunia. "Kenapa Indonesia melarang ekspor nikel? Agar Indonesia menjadi produsen terbesar untuk baterai dunia. Jadi kita tidak boleh hanya menjadi ekspor-ekspor bahan baku terus. 50% komponen dari baterai mobil listrik adalah baterai, dan bahan bakunya paling besar itu adalah nikel dan nikel 25% total cadangan dunia itu ada di Indonesia, lalu ada mangan ini paling banyak di Sulawesi Tenggara, lalu Kobalt yang merupakan produk turunan dari nikel. Hanya Litium kita impor dari Australia," tambahnya. Bahlil berharap pengusaha tambang nikel yang sudah memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di daerah bisa berkolaborasi dengan investor-investor yang masuk di Indonesia maupun pengusaha dalam negeri," terangnya. Sistem kolaborasi antar pengusaha itu telah tertuang dalam UU Cipta Kerja. Bahlil menyebutkan dalam UU itu dijelaskan setiap investasi yang masuk ke Indonesia wajib melibatkan pengusaha daerah. • pan